SKRIPSI

EFEKTIVITAS PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DALAM MENANGANI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PONTIANAK

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Kajian Kebijakan Publik

Disusun Oleh:
Sinta Carrisa
NIM. E1012201012

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2024

LEMBAR PERSETUJUAN

EFEKTIVITAS PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DALAM MENANGANI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PONTIANAK

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Sinta Carrisa

Nim. E1012201012

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Drs. Sukamto, M. Si Tanggal: 13-11-2024

NIP. 196010081987031002

Dosen Pembimbing Pendamping

Iving Arisdiyoto, M. AP Tanggal: 5-12-2024

NIP. 19880606202203200

LEMBAR PENGESAHAN

EFEKTIVITAS PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DALAM MENANGANI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PONTIANAK

Oleh:

Sinta Carrisa
NIM. E1012201012

Dipertahankan di : Pontianak
Pada Hari/Tanggal : Rabu, 18 Desember 2024
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 2

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Drs. Sukamto, M. Si	Iving Arisdiyoto, M. AP
NIP. 196010081987031002	NIP. 19880606202203200
Penguji Pertama	**Penguji Kedua**
Dr. Yulius Yohanes, M.Si.	Drs. Abdul Rahim, M.Si
NIP. 196405271992021001	NIP. 196308111990021001

Disahkan oleh:
Dekan Fisip Untan

Dr. Herlan, S.Sos, M. Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam menangani kawasan permukiman kumuh di Kota Pontianak. Program ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Surat Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 1063/D-PRKP/Tahun 2020. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis efektivitas program melalui teori implementasi kebijakan Richard Matland yang meliputi tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, dan tepat lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program KOTAKU secara umum efektif mengurangi kawasan kumuh melalui peningkatan infrastruktur dasar dan pengendalian banjir. Indikator tepat kebijakan menunjukkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, sementara tepat pelaksana menyoroti koordinasi antara DPRKP, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dan pihak lainnya. Namun, pada tepat target, ditemukan perbedaan persepsi antara masyarakat dan pelaksana program, di mana masyarakat merasa distribusi manfaat tidak merata. Tepat lingkungan mengungkapkan bahwa program telah memperhatikan kondisi lokal, meski partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan hasil program masih rendah. Rekomendasi penelitian meliputi peningkatan komunikasi dan transparansi antara pelaksana program dan masyarakat, penyebaran manfaat yang lebih merata, serta penguatan partisipasi masyarakat untuk menjaga keberlanjutan program.

Kata kunci : Program KOTAKU, Kawasan Kumuh, Kota Pontianak

ABSTRACT

This research aims to analyse the effectiveness of the Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Program in addressing slum areas in Pontianak City. The programme is based on Law Number 1 Year 2011 on Housing and Settlement Areas and Pontianak Mayor Decree Number 1063/D-PRKP/Tahun 2020. Using a descriptive qualitative approach, this research analyses the effectiveness of the program through Richard Matland's policy implementation theory which includes the right policy, right implementer, right target, and right environment. The results show that the KOTAKU Programme is generally effective in reducing slum areas through improving basic infrastructure and flood control. The right policy indicator shows policies that are in line with local needs, while the right implementer highlights the coordination between DPRKP, the Community Self-Help Agency (BKM), and other parties. However, on the right target, there is a difference in perception between the community and programme implementers, where the community feels that the distribution of benefits is unequal. Environmentally appropriate reveals that the programme has taken into account local conditions, although community participation in maintaining programme outcomes is still low. Research recommendations include improving communication and transparency between programme implementers and communities, more equitable distribution of benefits, and strengthening community participation to maintain programme sustainability.

Keyword : KOTAKU Programme, Slum Areas, Pontianak City

RINGKASAN SKRIPSI

Penelitian ini berjudul *"Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Menangani Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pontianak"*. Permukiman kumuh di Pontianak telah menjadi isu yang memprihatinkan karena berdampak negatif terhadap kualitas hidup masyarakat. Permasalahan seperti kurangnya akses terhadap infrastruktur dasar, buruknya pengelolaan limbah, ketidakteraturan bangunan, serta lemahnya tata kelola lingkungan menjadi sorotan utama. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah meluncurkan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang bertujuan mengurangi kawasan kumuh melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Permukiman kumuh tidak hanya menjadi permasalahan di Kota Pontianak tetapi juga di berbagai kota besar di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh adalah kawasan yang tidak layak huni akibat ketidakteraturan bangunan, kepadatan yang tinggi, serta rendahnya kualitas sarana dan prasarana. Di Pontianak, kawasan kumuh tersebar di beberapa lokasi strategis, seperti Kelurahan Bansir Laut dan Bangka Belitung Laut. Kawasan ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari jalan lingkungan yang rusak, sistem drainase yang buruk, hingga minimnya pengelolaan air limbah. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga hasil program sering kali menjadi kendala keberlanjutan program pengentasan kekumuhan.

Program KOTAKU hadir sebagai salah satu solusi strategis dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas kawasan kumuh. Program ini mengadopsi pendekatan partisipatif yang melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan hasil program. Dengan sasaran utama meningkatkan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, air bersih, sanitasi, dan drainase, program ini bertujuan menciptakan permukiman yang lebih layak huni, sehat, dan berkelanjutan. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan evaluasi mendalam untuk memastikan manfaatnya dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas Program KOTAKU di Kota Pontianak. Pendekatan ini bertujuan menggambarkan fenomena secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian juga menggunakan teori implementasi kebijakan Richard Matland yang menekankan empat variabel kunci, yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan. Lokasi penelitian meliputi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Pontianak serta beberapa kawasan permukiman kumuh, seperti Kelurahan Bansir Laut dan Bangka Belitung Laut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program KOTAKU secara umum efektif dalam mengurangi kawasan kumuh di Pontianak, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, yaitu:

1. **Ketepatan Kebijakan**

Kebijakan Program KOTAKU dirancang untuk menjawab kebutuhan lokal, terutama di kawasan kumuh seperti Pontianak. Program ini berfokus pada peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar yang sesuai dengan indikator kekumuhan. Namun, ditemukan adanya ambiguitas dalam penyesuaian program dengan kebutuhan masyarakat lokal. Misalnya, beberapa kebijakan dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di lapangan, seperti distribusi manfaat yang dirasakan tidak merata.

2. **Ketepatan Pelaksana**

Koordinasi antara pelaksana program, seperti DPRKP, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dan masyarakat, dinilai cukup baik. Namun, kendala utama terletak pada keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu, proses pencairan dana dari pemerintah pusat sering kali mengalami keterlambatan, sehingga menghambat pelaksanaan program di lapangan.

3. **Ketepatan Target**

Dalam pelaksanaannya, sasaran program sering kali tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Terdapat perbedaan persepsi antara pelaksana program dan masyarakat terkait prioritas kebutuhan. Masyarakat merasa bahwa manfaat program belum tersebar secara merata, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di beberapa lokasi sasaran.

4. **Ketepatan Lingkungan**

Program KOTAKU telah mempertimbangkan kondisi lingkungan lokal dalam pelaksanaannya. Namun, partisipasi masyarakat dalam memelihara hasil program masih rendah. Sebagai contoh, beberapa infrastruktur yang telah dibangun seperti jalan dan drainase mengalami kerusakan akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam merawat fasilitas tersebut.

Meskipun program ini memiliki potensi besar, tantangan implementasi masih cukup signifikan. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama, di mana alokasi dana tidak selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur di semua kawasan sasaran. Selain itu, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara hasil program menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan program ini. Kurangnya komunikasi yang efektif antara pelaksana program dan masyarakat juga menjadi penghambat dalam menciptakan pemahaman bersama tentang tujuan dan manfaat program.

Untuk meningkatkan efektivitas program KOTAKU, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan komunikasi dan transparansi dengan masyarakat agar tercipta keselarasan antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat lokal. Kedua, distribusi manfaat program harus dilakukan secara lebih merata, dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan spesifik setiap kawasan. Ketiga, perlu ada upaya untuk memperkuat partisipasi masyarakat, misalnya melalui edukasi dan pelatihan tentang pentingnya menjaga infrastruktur yang telah dibangun. Terakhir, pengalokasian anggaran yang

lebih efektif dan tepat waktu dari pemerintah pusat juga diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program.

Program KOTAKU di Kota Pontianak telah menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan infrastruktur dasar dan mengurangi kawasan kumuh. Namun, untuk mencapai keberlanjutan yang lebih baik, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Dengan peningkatan komunikasi, distribusi manfaat yang lebih merata, serta penguatan partisipasi masyarakat, program ini dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam menciptakan permukiman yang layak huni, sehat, dan berkelanjutan.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Sinta Carrisa

Nomor Mahasiswa : E1012201012

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya tulis ini merupakan hasil karya asli saya sendiri, buukan dibuat oleh orang lain dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di program studi, fakultas atau perguruan tinggi yang lain, dan sepanjang sepengetahuan saya, dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang atau institusi lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam Skripsi ini merupakan rujukan Daftar Pustaka di Skripsi ini.

Pontianak, 7 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Sinta Carrisa

E1012201012

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Hadapi ketakutan dan kesakitan dengan harapan yang tinggi"

"لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا"

Lā yukallifullāhu nafsan illā wus'ahā

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(Q.S Al-Baqarah · Ayat 286)

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Skripsi ini merupakan persembahan kecil untuk kedua orang tua saya Bapak **Umar Azmi** dan Ibu **Rillin** sebagai bukti sayang dan cinta yang tiada terhingga. Terimakasih karena sudah membimbing dan melindungi dengan tulus dan penuh keikhlasan, mencurahkan kasih sayang dan cintanya, serta senantiasa mendoakan, dan memberikan semangat serta dukungan sepenuh hati.
2. Skripsi ini saya persembahkan untuk Adik saya tercinta **Nadira Novisa**. Terimakasih atas bantuan, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan selama ini agar penulis menjadi sosok yang kuat dan mandiri.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Puji Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'alaa, karena atas limpahan berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh Dalam Menangani Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pontianak"**. Penulisan skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan Program Sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjugpura. Keberhasilan penulis dalam penulisan skripsi ini tidak akan tercapai jika tidak disertai dengan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura beserta jajaran.
2. Dr. Ira Patriani, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura beserta jajaran.
3. Drs. Sukamto, M. Si selaku dosen pembimbing pertama yang telah memberikan arahan dan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam penyusunan dan penulisan desain penelitian.
4. Iving Arisdiyoto, M. AP selaku dosen pembimbing kedua yang juga turut serta membantu memberikan arahan kepada penulis tentang penyusunan dan penulisan desain penelitian.

5. Dr. Yulius Yohanes, M.Si selaku dosen penguji utama yang telah memberikan kritik dan saran kepada penulis untuk hasil penelitian yang lebih baik lagi.
6. Drs. Abdul Rahim, M.Si selaku dosen penguji pendamping yang sudah memberikan saran dalam penulisan skripsi.
7. Dr. Azrita Mardhalena, M.Si selaku dosen pembimbing akademik penulis.
8. Bapak Derry Gunawan, ST, MT, M.Sc dan Bapak Gusti Dharma Setiawan, ST, serta staff DPRKP Kota Pontianak dan Masyarakat Kelurahan Bangka Belitung Laut dan Kelurahan Bansir Laut yang telah sangat membantu dan meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan penulis informasi terkait penelitian ini.
9. Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan, Hong Jisoo, Moon Junhui, Kwon Soonyoung, Jeon Wonwoo, Lee Jihoon, Seo Myunghao, Kim Mingyu, Lee Seokmin, Boo Seungkwan, Choi Hansol, Lee Chan sebagai anggota SEVENTEEN. Terima kasih karena telah menjadi inspirasi penulis dalam menyelesaikan skripsi melalui karya-karya luar biasa yang menjadi sumber inspirasi penulis selama masa-masa sulit.
10. Teman-teman mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan serta motivasi.
11. Semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, baik dari segi penulisan, materi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis memerlukan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pontianak, 02 November 2024

Sinta Carrisa
NIM. E1012201012

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN i
LEMBAR PENGESAHAN ii
ABSTRAK iii
ABSTRACT iv
RINGKASAN SKRIPSI v
PERNYATAAN KEASLIAN x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN xi
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xv
DAFTAR TABEL xviii
DAFTAR GAMBAR xix
DAFTAR LAMPIRAN xx
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Identifikasi Masalah 16
1.3. Fokus Penelitian 16
1.4. Rumusan Masalah 17
1.5. Tujuan Penelitian 17
1.6. Manfaat Penelitian 17
1.6.1 Manfaat Teoritis 18
1.6.2 Manfaat Praktis 18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 20
2.1. Landasan Teori 20
2.1.1. Kebijakan Publik 20
2.1.2 Evaluasi Kebijakan 23
2.1.3 Efektivitas Kebijakan Publik 25
2.1.4 Program KOTAKU 29
2.2. Penelitian yang Relevan 32
2.3. Alur Pikir Penelitian 36
2.4. Pertanyaan Penelitian 39

BAB III METODE PENELITIAN 40
3.1 Jenis Penelitian 40
3.2 Langkah-Langkah Penelitian 41
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 44
3.3.1. Lokasi Penelitian 44
3.3.2. Waktu Penelitian 44
3.4 Teknik Pengumpulan Data 45
3.5 Subjek dan Objek Penelitian 47
3.5.1 Subjek Penelitian 47
3.5.2 Objek Penelitian 48
3.6 Instrumen Pengumpulan Data 48
3.7 Teknik Analisis Data 49
3.8 Keabsahan Data 50
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 53
4.1 Gambaran Umum Kota Pontianak 53
4.1.1 Profil Kota Pontianak 53
4.1.2 Sejarah Kota Pontianak 55
4.1.3 Wilayah Administrasi 57
4.1.4 Visi dan Misi 64
4.2 Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Pontianak 65
4.2.1 Profil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Pontianak 65
4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Operasional 65
4.2.3 Struktur Organisasi 70
4.2.4 Sumber Daya 72
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 76
5.1 Deskripsi Hasil Penelitian 76
5.1.1 Evaluasi Kebijakan yang Diterapkan 76
5.1.2 Proses Pelaksana 82
5.1.3 Sasaran dan Target yang Diterapkan 85
5.1.4 Kondisi Lingkungan 90

5.2 Analisis Data 93
5.2.1 Ketepatan Kebijakan 93
5.2.2 Ketepatan Pelaksanaan 98
5.2.3 Ketepatan Target 104
5.2.4 Ketepatan Lingkungan 110
BAB VI PENUTUP 115
6.1 Kesimpulan 115
6.2 Saran 116
DAFTAR PUSTAKA 119
LAMPIRAN 124

DAFTAR TABEL

Tabel *halaman*

1. 1 Indikator Kumuh 2
1. 2 Basis Survei Kekumuhan 3
2. 1 Penelitian yang Relevan 35
3. 1 Waktu Penelitian 45
3. 2 Pedoman Observasi 46
4. 1 Tingkat Pendidikan Masyarakat Di Kecamatan Pontianak Tenggara 62
4. 2 Jenis Pekerjaan Masyarakat Di Kecamatan Pontianak Tenggara 63
4. 3 Jumlah Personel Berdasarkan Golongan 73
4. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 74
4. 5 Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Pontianak 75
5. 1 Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Pontianak 79
5. 2 Realisasi Target Program KOTAKU di Kecamatan Pontianak Tenggara 87

DAFTAR GAMBAR

Gambar *halaman*

1. 1 Grafik Luas Kawasan Kumuh di Kota Pontianak 9
1. 2 Lokasi Sasaran Program KOTAKU 2017-2023 di Kota Pontianak..... 13
2. 1 Bagan Alur Pikir Penelitian 38
4. 1 Peta Administrasi Kota Pontianak 54
4. 2 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Pontianak 72
5. 1 Monitoring Program KOTAKU 84
5. 2 Rumah Di Atas Aliran Sungai Kapuas Kelurahan Bansir Laut 88
5. 3 Kondisi Sungai Penuh Sampah di Tepian Sungai Kecamatan Pontianak Tenggara..... 89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran *Halaman*

1 Pedoman Wawancara DPRKP Kota Pontianak 124
2 Pedoman Wawancara Koordinator Program KOTAKU 126
3 Pedoman Wawancara BKM 128
4 Pedoman Wawancara Masyarakat 130
5 Pedoman Observasi 132
6 Surat Tugas 133
7 Daftar Nama Responden 134
8 Dokumentasi 134

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia, isu tentang permukiman kumuh telah menjadi perhatian yang signifikan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan ketiadaan kebijakan yang inovatif, diperkirakan rata-rata pertumbuhan pemukiman kumuh di Indonesia akan semakin meluas menjadi 71.860 hektar pada tahun 2025 (Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, 2013). Implikasinya, kemungkinan terjadinya penurunan tingkat kesehatan masyarakat menjadi lebih besar karena kurangnya penyediaan sarana dan prasarana di kawasan tersebut (Ghifari, 2021).

Faktor utama di balik keberadaan permukiman kumuh adalah kemiskinan, kurangnya akses ke tempat tinggal yang layak, termasuk perumahan dan infrastruktur, fasilitas umum (PSU), legalitas kepemilikan tanah sebagai bukti kepemilikan, serta tata kelola pemerintahan yang lemah dan kurang efektif. Kendala seperti keterbatasan lahan perkotaan dan daya beli masyarakat yang rendah menjadi faktor utama yang menyebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan penyediaan rumah oleh sektor publik dan swasta (Prayitno, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak

memenuhi persyaratan. Hal mendasar dalam menangani permasalahan kekumuhan perkotaan di Indonesia adalah ketersediaan tanah yang dapat dibangun untuk perumahan layak huni beserta PSU.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/2018, terdapat 7 (tujuh) aspek dan 16 (enam belas) indikator yang menjadi acuan dalam menentukan baseline dan menilai tingkat kekumuhan perumahan dan permukiman.

Tabel 1. 1

Indikator Kumuh

ASPEK	KRITERIA
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan bangunan
	Tingkat kepadatan hunian
	Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan pelayanan jalan lingkungan
	Kualitas permukaan jalan lingkungan
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan akses aman air minum
	Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air
	Ketidaksediaan drainase
	Kualitas konstruksi drainase
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis

	Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis
	Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaksediaan prasarana proteksi kebakaran
	Ketidaksediaan sarana proteksi kebakaran

Sumber : Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/2018

Setiap aspek dan kriteria kekumuhan tentunya memiliki indikator yang merupakan basis survei dalam penyusunan atau *input baseline* kekumuhan. Indikator kekumuhan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 1. 2

Basis Survei Kekumuhan

NO	Kriteria	Indikator
A. Aspek Bangunan Gedung		
1	Ketidakteraturan Bangunan	a. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau

		b. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevansi lantai, konsep identitas
2	Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang	a. KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; b. KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau c. Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: ❖ Untuk kota metropolitan dan kota besar >250 unit/Ha ❖ Untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha
3	Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan	a. Pengendalian dampak lingkungan b. Pembangunan bangunan Gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum c. Kesehatan bangunan gedung d. Kenyamanan bangunan gedung e. Kemudahan bangunan gedung
B. Aspek Jalan Lingkungan		
1	Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman (cakupan pelayanan)	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis.

2	Kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman
C. Aspek Penyediaan Air Minum		
1	Akses aman air minum tidak tersedia	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.
2	Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari
D. Aspek Drainase Lingkungan		
1	Drainase lingkungan tidak tersedia	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan
2	Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun.
3	Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	Kualitas kontruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan

E. Aspek Pengelolaan Air Limbah/Sanitasi		
1	Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu, kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangka septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat
2	Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: a. Kakus/kloset tidak terhubung dengan tangka septik; b. Tidak tersedianya pengelolaan limbah setempat atau terpusat
F. Aspek Pengelolaan Persampahan		
1	Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi dengan persyaratan teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: a. Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; b. Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (*reduce, reuse, recycle*) pada skala lingkungan; c. Sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan

2	Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut; a. Pewadahan dan pemilahan domestik; b. Pengumpulan lingkungan; c. Pengangkutan lingkungan; d. Pengelolaan lingkungan
G. Aspek Potensi Kebakaran		
1	Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu; a. Pasokan air; b. Jalan lingkungan; c. Sarana komunikasi; dan/atau; d. Data sistem proteksi kebakaran lingkungan;
2	Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu; a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); b. Kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau mobil tangga sesuai kebutuhan
Jika terdapat pemadam kebakaran dengan radius 5km dari kawasan permukiman kumuh maka dinyatakan sudah terpenuhi dari Aspek Proteksi Kebakaran dan tidak ada penanganan terkait aspek tersebut.		

Sumber : Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/2018

Kawasan yang tidak layak huni akibat ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan tinggi, serta kualitas sarana dan prasarana yang tidak memenuhi

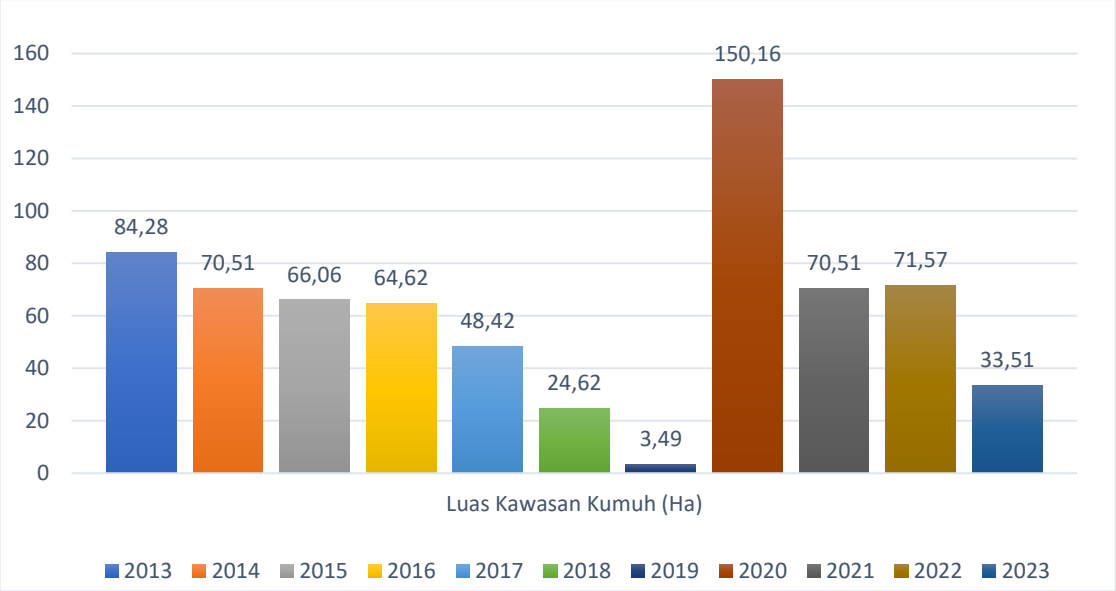
syarat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/2018, terdapat tujuh aspek yang menjadi kriteria kekumuhan, yaitu kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. Setiap aspek ini dilengkapi dengan indikator numerik untuk mengukur secara kuantitatif.

Untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh tersebut, Pemerintah Indonesia telah mencanangkan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) sebagai upaya penanganan permukiman kumuh secara terpadu dan kolaboratif. Program KOTAKU dilaksanakan secara nasional di 34 Provinsi dengan tujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dasar di kawasan permukiman kumuh dan mencegah munculnya kawasan kumuh baru. Berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Kota Tanpa Kumuh, program ini mengadopsi pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan infrastruktur. Petunjuk teknis ini mengatur harmonisasi kegiatan, pendanaan, serta mekanismme pelaksanaan yang mencakup tahap persiapan, perencanaan, konstruksi, dan pasca-konstruksi. Dengan indikator keberhasilan yang terukur, program ini diharapkan dapat mengurangi luas kawasan kumuh secara signifikan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah sasaran. Adapun yang menjadi sasaran kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), adalah :

1. Tersedianya dan berfungsinya kembali infrastruktur dasar perumahan dan permukiman di kawasan perkotaan;
2. Berkurangnya tingkat kekumuhan pada lokasi yang ditangani; dan
3. meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan infrastruktur

Gambar 1. 1

Grafik Luas Kawasan Kumuh di Kota Pontianak



Sumber: DPRKP Kota Pontianak 2024, diolah oleh penulis

Terdapat fluktuasi yang signifikan dalam luas kawasan kumuh di Kota Pontianak. Data yang diperoleh dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak mengungkapkan tren penurunan luas kawasan kumuh dari tahun 2013 hingga 2019, dimulai dari 84,28 hektar pada 2013 dan menurun drastis menjadi 3,49 hektar pada 2019. Namun, pada tahun 2020 terjadi lonjakan yang signifikan menjadi 150,16 hektar dan fluktuasi ini terus berlanjut hingga tahun 2023 di mana luas kawasan kumuh kembali mengalami

penurunan menjadi 33,51 hektar. Kenaikan dan penurunan yang tajam dalam luas kawasan kumuh menyoroti perubahan dramatis dalam perkembangan permukiman di kota, mengindikasikan kemungkinan adanya faktor-faktor yang berkontribusi pada perubahan ini, serta menunjukan urgensi dalam memahami dan menangani permasalahan kawasan kumuh di Kota Pontianak.

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru merupakan aspek kunci yang diatur dalam Bab IV dari Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Peraturan tersebut menekankan pentingnya mengadopsi langkah-langkah proaktif untuk mencegah terbentuknya permukiman kumuh yang dapat mengancam kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan. Pencegahan ini dapat mencakup beberapa tindakan, seperti peningkatan pengawasan dan regulasi ketat terhadap perizinan pembangunan, pemantauan ketat terhadap tindakan-tindakan yang dapat berpotensi mengakibatkan perumahan kumuh, serta pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya pemukiman yang sehat dan berkualitas. Dengan demikian, upaya pencegahan tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik, memastikan pertumbuhan perkotaan yang berkelanjutan, serta mencegah terbentuknya permukiman kumuh yang berpotensi mengganggu kualitas hidup penduduk Kota Pontianak.

Menurut Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Pontianak kawasan kumuh di Pontianak saat ini mencapai kurang lebih 0,4% atau sekitar

40 hektar. Meskipun angka ini sudah sangat rendah, beliau menyampaikan bahwa penanganan terhadap kawasan kumuh tetap menjadi perhatian utama. Beliau menyoroti pentingnya untuk tetap berfokus dalam mengimplementasikan penanganan kawasan kumuh meskipun persentasenya rendah karena menyadari adanya potensi munculnya kawasan kumuh baru setiap tahun seperti yang dapat kita lihat di tahun 2020 (Kasmad, 2018).

Pemerintah Kota Pontianak telah meluncurkan beberapa program untuk mengatasi kawasan kumuh. Program bedah rumah telah diterapkan sejak tahun 2008, menghasilkan penurunan signifikan dalam jumlah rumah tak layak huni, yang kini berjumlah sekitar 700 rumah. Angka tersebut menunjukkan penurunan yang mencolok dari sekitar 13.000 rumah tak layak huni dalam 15 tahun terakhir di Kota Pontianak (Rokib, 2022). Selain itu, program hibah air minum perkotaan telah dilaksanakan sejak tahun 2010, yang menghasilkan Pembangunan 20.093 sambungan rumah dari tahun 2015 hingga 2022 (Santoso, 2023). Pada tahun 2021, program bedah toilet telah diinisiasi, dengan 106 warga menerima bantuan rehab toilet di tahun 2023 (Mahardika, 2023). Program perbaikan jalan dan drainase telah berjalan sejak tahun 2008, dan hasilnya terlihat dengan banyaknya jalan kota dan drainase yang dibangun di Pontianak, terutama untuk mengatasi masalah banjir.

Bentuk-bentuk penanganan permukiman kumuh yang telah dilaksanakan di Pontianak mencakup program KOTAKU seperti yang telah diatur dalam (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/, 2016) tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh

dan permukiman kumuh. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Program KOTAKU diterjemahkan ke dalam 2 kegiatan, yaitu peningkatan kualitas permukiman dan pencegahan permukiman kumuh yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif. Namun pada pelaksanaannya masih rendah Tingkat partisipasi masyarakat, dan masih banyak masyarakat yang bergantung dari bantuan pemerintah sehingga kurang kesadaran untuk menjaga dan mengelola lingkungan sendiri. Adapun ada 18 Kelurahan yang menjadi target peningkatan kualitas permukiman kumuh dan

Meskipun telah ada analisis mengenai kondisi sosial-ekonomi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pontianak (Putri et al., 2016) ditemukan bahwa belum ada penjelasan mendalam mengenai strategi atau program konkret yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak untuk meningkatkan kondisi sosial-ekonomi penduduk di kawasan tersebut. Meskipun pentingnya perbaikan kondisi sosial-ekonomi disorot, namun belum ada rincian Langkah-langkah atau program yang dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Pontianak dalam merumuskan penanganan permukiman kumuh di kota Pontianak (Muta'ali & Nugroho, A, 2020).

Gambar 1. 2

Lokasi Sasaran Program KOTAKU 2017-2023 di Kota Pontianak

No.	Nama Provinsi	Nama Kabupaten/Kota	No. Urut Kec.	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan		Status Kumuh	
					No. urut Kelurahan	Nama Kelurahan	Kumuh (Lokasi Penanganan)	Non Kumuh (Lokasi Pencegahan)
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	Kalimantan Barat	Pontianak	1	Pontianak Barat	1	Pallima		1
		Pontianak	1	Pontianak Barat	2	Sungaijawi Dalam		1
		Pontianak	1	Pontianak Barat	3	Sungaijawi Luar	1	
		Pontianak	1	Pontianak Barat	4	Sungaibeliung	1	
		Pontianak	2	Pontianak Kota	1	Sungaibangkong		1
		Pontianak	2	Pontianak Kota	2	Daratsekip	1	
		Pontianak	2	Pontianak Kota	3	Tengah	1	
		Pontianak	2	Pontianak Kota	4	Mariana	1	
		Pontianak	2	Pontianak Kota	5	Sungaijawi		1
		Pontianak	3	Pontianak Selatan	1	Benuamelayu Laut	1	
		Pontianak	3	Pontianak Selatan	2	Benuamelayu Darat	1	
		Pontianak	3	Pontianak Selatan	3	Parittokaya		1
		Pontianak	3	Pontianak Selatan	4	KotaBaru		1
		Pontianak	3	Pontianak Selatan	5	Akcaya		1
		Pontianak	4	Pontianak Tenggara	1	Bansir Laut	1	
		Pontianak	4	Pontianak Tenggara	2	Bansir Darat	1	
		Pontianak	4	Pontianak Tenggara	3	Bangka belitung Laut		1
		Pontianak	4	Pontianak Tenggara	4	Bangka belitung Darat		1
		Pontianak	5	Pontianak Timur	1	Paritmayor		1
		Pontianak	5	Pontianak Timur	2	Banjar serasan	1	
		Pontianak	5	Pontianak Timur	3	Saigon		1
		Pontianak	5	Pontianak Timur	4	TanjungHulu	1	
		Pontianak	5	Pontianak Timur	5	TanjungHilir	1	
		Pontianak	5	Pontianak Timur	6	Dalambugis	1	
		Pontianak	5	Pontianak Timur	7	Tambelansampit	1	
		Pontianak	6	Pontianak Utara	1	Siantan Hulu	1	
		Pontianak	6	Pontianak Utara	2	Siantan Tengah	1	
		Pontianak	6	Pontianak Utara	3	Siantan Hilir	1	
		Pontianak	6	Pontianak Utara	4	Batulayang	1	
		JUMLAH		6 Kecamatan		29 Kelurahan	18	11

Sumber : DPRKP Kota Pontianak, 2023.

Kota Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, menghadapi tantangan dalam menangani isu permukiman kumuh yang tersebar di berbagai kecamatan. Data menunjukkan bahwa di Kota Pontianak terdapat 18 lokasi sasaran program KOTAKU pada tahun 2017 sampai tahun 2023, dengan total 18 kawasan kumuh. Hal ini mengindisikasikan adanya isu permukiman kumuh yang signifikan di Kota Pontianak. Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) merupakan upaya pemerintah untuk menangani permasalahan permukiman kumuh di berbagai kota di Indonesia, termasuk Kota Pontianak. Tujuan utama program KOTAKU adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan

aksebilitas di kawasan kumuh, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah sasaran.

Kecamatan Pontianak Tenggara, sebagai salah satu wilayah di Kota Pontianak menghadapi permasalahan serius terkait kawasan permukiman kumuh. Banyak penduduk di kawasan ini yang juga masih tinggal di atas badan air, yang mengakibatkan kondisi permukiman seringkali tidak memiliki infrastruktur yang memadai, sehingga membuat aksebilitas menjadi tantangan tersendiri. Selain itu banyak jalanan di kawasan ini yang masih berupa gertak kayu dan sempit, yang membatasi mobilitas penduduk dan akses ke layanan dasar.

Kondisi ini diperparah dengan praktik mandi menggunakan air sungai, yang seringkali tercemar oleh sampah dan limbah. Hal ini tidak hanya berpotensi menimbulkan masalah Kesehatan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak bersih dan aman. Masyarakat yang bergantung pada air sungai untuk kebutuhan sehari-hari berisiko terpapar penyakit, terutama di Tengah kondisi sanitasi yang buruk.

Namun, implementasi Program KOTAKU di Kecamatan Pontianak Tenggara menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kesulitan dalam koordinasi antar lembaga menjadi beberapa faktor yang menghambat efektivitas program. Selain itu, kondisi geografis yang unik, dengan banyaknya permukiman di tepi Sungai maupun di

atas badan air, memerlukan pendekatan khusus dalam perencanaan dan pelaksanaan program (Meliana Elisabet et al., 2020).

Kecamatan Pontianak Tenggara merupakan salah satu wilayah di Kota Pontianak yang menghadapi tantangan signifikan terkait kawasan permukiman kumuh. Beberapa titik di wilayah ini menunjukkan karakteristik kekumuhan yang mencolok, seperti kondisi bangunan rumah yang tidak teratur dan berdempetan, jalan lingkungan yang sempit dan rusak, serta kurangnya akses terhadap air bersih dan drainase yang memadai. Pengelolaan sampah yang buruk semakin memperburuk kondisi lingkungan, di mana tumpukan sampah sering ditemukan di selokan dan bantaran sungai. Hal ini menciptakan risiko banjir dan penyebaran penyakit.

Selain itu, sebagian besar masyarakat di kawasan kumuh Pontianak Tenggara termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sehingga kemampuan mereka untuk memperbaiki kondisi lingkungan sangat terbatas. Sebagian rumah masih menggunakan kayu sebagai bahan utama bangunan, membuatnya rentan terhadap bencana kebakaran atau kerusakan akibat cuaca ekstrem.

Berdasarkan petunjuk teknis Program KOTAKU, kawasan permukiman kumuh harus memenuhi indikator kekumuhan, seperti kondisi bangunan, drainase, pengelolaan sampah, dan jalan lingkungan. Petunjuk teknis juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan partisipatif untuk memberdayakan masyarakat dalam memperbaiki lingkungan mereka. Namun, di Pontianak

Tenggara, kurangnya edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi tantangan utama dalam implementasi program. Selain itu, peraturan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menekankan pentingnya kawasan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan. Meski begitu, realitas di lapangan menunjukkan bahwa belum semua standar peraturan tersebut terpenuhi di Kecamatan Pontianak Tenggara.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengevaluasi efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh dalam meninngkatkan kualitas permukiman dan kehidupan masyarakat di Kota Pontianak dengan judul penelitian **"Efektivitas Program Kotaku dalam Menangani Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Pontianak"**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka didapatkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1) Terdapat ambiguitas terkait penyesuaian program dengan kebutuhan dan kebiasaan masyarakat lokal
2) Ketidaksesuaian program dengan kebutuhan masyarakat
3) Proses pencairan anggaran dari pusat ke daerah mengalami keterlambatan

1.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat untuk membatasi objek penelitian yang akan diangkat, manfaat lainnya yaitu agar penulis tidak terjebak pada banyaknya

data yang diperoleh di lapangan. Kelurahan Bansir Laut dan Kelurahan Bangka Belitung Laut memiliki karakteristik kawasan yang masih menghadapi permasalahan kekumuhan, seperti infrastruktur jalan lingkungan yang rusak, sistem drainase yang kurang memadai, dan pengelolaan air limbah yang belum optimal. Kedua kelurahan ini juga termasuk dalam daftar prioritas penanganan kekumuhan oleh Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Pontianak. Lokasi ini dipilih untuk mengevaluasi efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), mengingat intervensi pemerintah mencakup pengembangan infrastruktur hingga pemberdayaan masyarakat.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu "Bagaimana efektivitas Program Kota Tanpa Kumuh dalam menangani kawasan permukiman kumuh di Kota Pontianak ?".

1.5. Tujuan Penelitian

berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah "Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas program Kota Tanpa Kumuh dalam menangani kawasan permukiman kumuh di Kota Pontianak".

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memperkaya teori tentang kawasan kumuh yang mengacu pada konsep kekumuhan sebagai dampak dari ketidakmampuan pemerintah menyediakan perumahan layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kesenjangan sosial akibat urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik. Selain itu, penelitian ini mendukung pengembangan teori tentang indikator kekumuhan yang dikemukakan oleh (UN-Habitat, 2003), yaitu kualitas bangunan, akses terhadap air bersih, sanitasi, dan keberlanjutan lingkungan.

Penelitian ini juga mengevaluasi kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai upaya mencapai target penghapusan kawasan kumuh yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 dan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sehingga memberikan kontribusi pada kajian akademik terkait evaluasi kebijakan berbasis partisipasi masyarakat.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Pontianak.

   Penelitian ini dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah spesifik yang dihadapi masyarakat di Kota Pontianak sehingga bisa menjadi dasar bagi pengembangan program dan kebijakan yang lebih baik di masa mendatang, termasuk dalam

aspek pengambilan keputusan dan strategis dalam pengelolaan permukiman kumuh.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat di kawasan kumuh Kecamatan Pontianak Tenggara tentang pentingnya menjaga lingkungan permukiman yang layak huni, mendorong pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, serta memberikan solusi untuk meningkatkan kualitas hidup melalui perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, air bersih, dan pengelolaan limbah, sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam mendukung kebijakan publik yang berkelanjutan

c. Bagi Penulis

Dengan dilakukan penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan terhadap kajian kebijakan publik dan penerapan ilmu-ilmu yang didapatkan selama berkuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.